

Studi Kualitatif tentang Persepsi Pegawai terhadap Transparansi Manajemen di Kantor Desa di Kantor Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu

A Qualitative Study on Employees' Perceptions of Management Transparency at the Liberia Village Office, Teluk Mengkudu Subdistrict, Serdang Bedagai Regency

Lia Saputri¹, Hablil Ikhwana², Zulaili³, Fahri Alamsyah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

Employees' Perceptions, Management Transparency



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study explores employees' perceptions of management transparency at Liberia Village Office, Teluk Mengkudu Subdistrict, Serdang Bedagai Regency. Transparency is considered a key principle of good governance because it enhances accountability, public trust, and community participation. However, its implementation at the village level often faces challenges, including limited facilities, low public literacy, and less open bureaucratic traditions. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, then analyzed thematically. The findings show that transparency has been implemented fairly well through information boards, village meetings, and direct community outreach. Employees perceive transparency as both a moral responsibility and a legal obligation, as well as an important strategy for strengthening public trust. They emphasize the importance of community participation in village deliberations, involvement in decision-making processes, and open communication among staff to support transparent governance. Despite these positive perceptions, several challenges remain. Many villagers are not

accustomed to reading written reports, have limited understanding of financial terminology, and often require additional explanations regarding village programs and budgets. In addition, village staff face limitations in time, human resources, and capacity to conduct ongoing public outreach, reducing the effectiveness of information dissemination. The study concludes that transparency extends beyond simply providing information. Information must also be accessible, understandable, and accepted by the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen di Kantor Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Transparansi dipandang sebagai prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena dapat meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat, dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transparansi telah berjalan cukup baik melalui penyediaan papan informasi, pelaksanaan pertemuan desa, dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Pegawai memandang transparansi sebagai tanggung jawab moral, kewajiban hukum, serta sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Mereka juga menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan komunikasi terbuka antarpegawai merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya kebiasaan masyarakat dalam membaca laporan tertulis, keterbatasan pemahaman terhadap istilah keuangan, serta kurangnya waktu dan sumber daya aparatur desa untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi tidak hanya sebatas keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan informasi dapat diakses, dipahami, dan diterima oleh masyarakat.

PENDAHULUAN

Transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi administratif, tetapi juga mencerminkan integritas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Penerapan transparansi secara konsisten diyakini mampu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi manajemen menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola dan kredibilitas lembaga pemerintahan desa.

Meskipun demikian, pelaksanaan transparansi manajemen pada tingkat pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip *good governance*, serta budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi transparansi belum berjalan secara optimal. Selain itu, persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen turut memengaruhi keberhasilan penerapannya. Persepsi yang positif akan mendorong pegawai untuk bersikap lebih terbuka, proaktif dalam menyampaikan informasi, dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Sebaliknya, persepsi yang negatif dapat menimbulkan resistensi, kurangnya kepedulian, dan rendahnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi bagian dari budaya kerja organisasi publik.

Dalam konteks penelitian ini, Kantor Desa Liberia di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki posisi yang strategis dalam memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga, kantor desa dituntut untuk menerapkan manajemen yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pegawai di lingkungan Kantor Desa Liberia memandang dan memahami transparansi manajemen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam agar diperoleh gambaran nyata mengenai persepsi pegawai terhadap praktik transparansi yang diterapkan dalam organisasi tersebut.

Penelitian ini berangkat dari anggapan bahwa persepsi pegawai merupakan cerminan kondisi internal organisasi yang dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa. Persepsi tersebut terbentuk melalui berbagai faktor, seperti nilai-nilai pribadi, pengalaman kerja, kebijakan pimpinan, serta pola komunikasi yang berkembang dalam organisasi. Dengan memahami persepsi pegawai, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam penerapan transparansi manajemen. Hasil pemahaman tersebut sangat penting sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kebijakan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna subjektif yang dimiliki pegawai terkait transparansi manajemen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan interpretasi pegawai terhadap kebijakan serta praktik transparansi

yang berlangsung di Kantor Desa Liberia. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan budaya organisasi yang memengaruhi perilaku pegawai dan penerapan prinsip keterbukaan dalam lingkungan kerja pemerintahan desa.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun, penelitian ini menyoroti beberapa persoalan utama, yaitu belum optimalnya penerapan transparansi manajemen di pemerintahan desa, masih terbatasnya kajian mengenai persepsi pegawai terhadap transparansi, kemungkinan adanya kesenjangan antara kebijakan transparansi dengan implementasinya, serta belum adanya penelitian yang secara khusus mengungkap makna transparansi dari perspektif pegawai di Kantor Desa Liberia. Di samping itu, persepsi pegawai yang negatif berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik, sedangkan persepsi yang positif dapat memperkuat budaya kerja yang terbuka dan bertanggung jawab.

Penelitian ini dibatasi hanya pada pegawai yang bekerja di Kantor Desa Liberia yang memiliki peran dalam administrasi dan pelayanan publik. Fokus penelitian diarahkan pada persepsi pegawai mengenai keterbukaan informasi, akuntabilitas pengambilan keputusan, dan akses terhadap proses manajerial yang berkaitan dengan tugas mereka. Penelitian tidak bertujuan mengukur tingkat transparansi secara kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada penggalan pengalaman dan pemahaman subjektif pegawai. Hasil penelitian bersifat deskriptif dan interpretatif sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh desa, melainkan memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai kondisi yang terjadi di Kantor Desa Liberia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen yang diterapkan di Kantor Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen di kantor desa tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan kajian administrasi publik dan literatur mengenai transparansi pemerintahan desa, serta manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan informasi, partisipasi pegawai, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen di Kantor Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan institusi pemerintahan desa yang secara langsung menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga menjadi tempat yang relevan untuk mengamati praktik transparansi manajemen serta bagaimana pegawai memaknainya dalam aktivitas kerja sehari-hari. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman yang mendalam mengenai persepsi pegawai terhadap keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses terhadap prosedur organisasi, dan komunikasi internal yang berlangsung dalam lingkungan kerja pemerintahan desa.

Subjek penelitian terdiri atas pegawai Kantor Desa Liberia yang bekerja dalam struktur pemerintahan desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta staf pelaksana. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan berbagai tugas administrasi dan pelayanan publik serta terlibat dalam proses manajerial yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, objek penelitian adalah persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen. Persepsi tersebut mencakup bagaimana pegawai memahami, menilai, merasakan, dan menginterpretasikan praktik-praktik transparansi yang diterapkan oleh organisasi dan

pimpinan desa. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek formal transparansi, tetapi juga pengalaman nyata pegawai dalam mengakses informasi, berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, serta merasakan akuntabilitas dan keterbukaan komunikasi di lingkungan kerja mereka.

Penelitian direncanakan berlangsung selama sembilan bulan, mulai Oktober 2025 hingga Juni 2026. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, penyusunan hasil penelitian, bimbingan hasil, hingga pelaksanaan ujian atau sidang akhir penelitian. Perencanaan waktu yang sistematis ini dimaksudkan agar setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam penelitian ini, narasumber dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Narasumber utama terdiri atas perangkat desa yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses administrasi, pengambilan keputusan, pengelolaan informasi, serta pelaksanaan program kerja desa. Jika diperlukan, kepala desa juga dapat dijadikan informan kunci untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kebijakan dan praktik transparansi yang diterapkan. Keterlibatan informan dari berbagai posisi memungkinkan peneliti memperoleh sudut pandang yang beragam sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi transparansi manajemen di kantor desa. Selain sebagai sumber informasi, para narasumber juga dipandang sebagai representasi dari dinamika sosial dan birokrasi yang berkembang dalam organisasi pemerintahan desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk narasi, pengalaman, pandangan, serta interpretasi para informan. Data tersebut diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber sehingga mampu menggambarkan makna subjektif yang melekat pada pengalaman kerja mereka. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui proses wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan desa, arsip organisasi, dan berbagai literatur akademik yang relevan dengan konsep transparansi manajemen serta persepsi pegawai. Kombinasi kedua sumber data tersebut digunakan untuk meningkatkan kekuatan analisis dan memperkuat validitas hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi, yaitu memadukan beberapa metode agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik pertama adalah wawancara mendalam yang dilaksanakan secara semi-terstruktur. Melalui wawancara ini, peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman pegawai mengenai keterbukaan informasi, partisipasi, akuntabilitas, serta komunikasi dalam organisasi. Teknik kedua adalah observasi partisipatif yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kerja dan interaksi yang berlangsung di lingkungan kantor desa. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kesesuaian antara informasi yang disampaikan narasumber dengan kondisi nyata di lapangan. Teknik ketiga adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan kegiatan, notulen rapat, dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dan media informasi desa. Penggunaan ketiga teknik tersebut secara bersamaan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik transparansi manajemen.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan berbagai tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis dimulai dengan proses

transkripsi data dan pencatatan hasil observasi secara sistematis. Selanjutnya dilakukan pengkodean terhadap data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan makna dan pola yang muncul. Dari kategori tersebut, peneliti menyusun tema-tema utama yang menggambarkan persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen. Tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif untuk menjelaskan makna, faktor yang memengaruhi persepsi pegawai, serta dampaknya terhadap dinamika organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah persepsi pegawai terhadap transparansi manajemen yang didefinisikan sebagai penilaian subjektif pegawai mengenai penerapan prinsip transparansi oleh organisasi dan pimpinan desa. Variabel tersebut dijabarkan ke dalam lima dimensi utama, yaitu keterbukaan informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, akses terhadap prosedur organisasi, dan komunikasi internal terbuka. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian, pelaksanaan wawancara, observasi, serta analisis data. Dengan adanya definisi operasional yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pegawai memandang transparansi manajemen, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penelitian, Desa Liberia merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, yang memiliki sejarah panjang perkembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Nama Liberia berasal dari jenis kopi Liberia yang dibawa dan ditanam oleh Belanda pada tahun 1916. Seiring perkembangan waktu, wilayah yang semula dikenal sebagai Kampung Liberia berubah menjadi Desa Liberia dan berkembang menjadi tiga dusun. Secara geografis desa ini berada pada dataran rendah dengan luas wilayah sekitar 900 hektar serta memiliki posisi strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten. Penduduk desa berjumlah 2.487 jiwa yang tersebar dalam 730 kepala keluarga dengan mayoritas beragama Islam dan berasal dari suku Jawa. Kondisi masyarakat cukup heterogen dengan mata pencaharian utama sebagai wiraswasta, pekerja perkebunan, buruh tani, dan berbagai pekerjaan lainnya. Desa ini memiliki potensi besar dalam bidang perkebunan, peternakan, pendidikan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong.

Perkembangan Desa Liberia tidak terlepas dari perjalanan pemerintahan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Berbagai kepala desa telah memimpin desa ini dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelesaian berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Berbagai pembangunan yang telah dilakukan meliputi normalisasi penanggulangan banjir, pembangunan jalan desa, pembangunan jalan antar dusun, pembangunan rumah tidak layak huni, serta peningkatan fasilitas umum lainnya. Namun demikian, desa juga menghadapi berbagai tantangan seperti wabah penyakit, keterbatasan ekonomi masyarakat, ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, serta dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun secara umum, perkembangan desa menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam berbagai sektor pembangunan.

Dari sisi kelembagaan, pemerintahan desa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Struktur organisasi tersebut menggambarkan

pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, administrasi, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Struktur tersebut dipimpin oleh Syaifuddin sebagai Kepala Desa yang dibantu perangkat desa lainnya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Visi pembangunan Desa Liberia diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berakhlak, berintegritas, cerdas, sehat, dan mampu bekerja sama melalui semangat gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah desa menetapkan berbagai misi, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Visi dan misi ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan para Kepala Dusun menunjukkan bahwa transparansi manajemen di Kantor Desa Liberia telah berjalan dengan cukup baik. Bentuk transparansi yang dilakukan antara lain melalui pemasangan informasi pada papan pengumuman, pelaksanaan rapat internal, penyelenggaraan musyawarah desa, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat. Para pegawai menilai bahwa keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari budaya kerja yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan desa. Transparansi dipandang sebagai sarana untuk mencegah munculnya prasangka negatif, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam konsistensi publikasi informasi dan perluasan akses informasi kepada seluruh warga masyarakat.

Analisis mengenai keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa seluruh narasumber merasa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program desa. Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Para pegawai diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun usulan sebelum kebijakan ditetapkan. Para kepala dusun juga berperan aktif dalam membawa aspirasi masyarakat ke forum musyawarah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya budaya organisasi yang partisipatif dan mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan tersebut menumbuhkan rasa memiliki, meningkatkan tanggung jawab bersama, dan memperkuat komitmen pegawai dalam melaksanakan berbagai program pembangunan desa.

Dalam pengelolaan dana desa, seluruh narasumber menilai bahwa transparansi telah diterapkan dengan baik melalui penyampaian laporan keuangan, publikasi penggunaan anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah pembangunan desa. Laporan penggunaan dana desa dipublikasikan melalui papan informasi dan dijelaskan pada forum-forum resmi. Aparatur desa menyadari bahwa dana desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran dan program pembangunan harus dapat dijelaskan secara terbuka. Transparansi dana desa dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan potensi kesalahpahaman maupun kecurigaan terhadap pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap laporan keuangan sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pimpinan desa telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan. Penjelasan dilakukan melalui rapat resmi, diskusi internal, serta forum musyawarah desa. Para pegawai merasa memperoleh

informasi yang jelas mengenai arah kebijakan, program kerja, dan tujuan pembangunan desa. Keterbukaan pimpinan dalam menjelaskan kebijakan memberikan dampak positif terhadap koordinasi kerja, pemahaman tugas, dan kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai juga mendorong tumbuhnya rasa percaya, penghargaan, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja pemerintahan desa.

Hubungan antarpegawai di Kantor Desa Liberia juga dinilai sangat baik, harmonis, dan mendukung terciptanya transparansi manajemen. Para pegawai secara rutin melakukan koordinasi, saling berbagi informasi, dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kerja yang baik membuat informasi dapat disampaikan secara cepat dan akurat sehingga meminimalkan kesalahan komunikasi. Para kepala dusun juga menyatakan bahwa komunikasi dengan perangkat desa berjalan dengan baik sehingga mereka dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat. Hubungan yang harmonis tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan budaya transparansi yang berkelanjutan dan efektif.

Dari sisi akses informasi program desa, para narasumber menyatakan bahwa informasi relatif mudah diperoleh melalui papan pengumuman, rapat, musyawarah desa, surat edaran, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat. Aparatur desa berupaya memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, terdapat kendala berupa rendahnya minat sebagian warga untuk membaca informasi yang dipasang pada papan pengumuman sehingga diperlukan pendekatan komunikasi langsung melalui pertemuan warga dan sosialisasi lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Sikap masyarakat terhadap keterbukaan informasi desa pada umumnya sangat positif. Masyarakat merasa lebih percaya kepada pemerintah desa ketika laporan kegiatan dan penggunaan dana diumumkan secara terbuka. Selain itu, masyarakat menjadi lebih aktif, kritis, dan berani menyampaikan pendapat maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah desa. Aparatur desa memandang sikap kritis masyarakat sebagai hal yang positif karena dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi telah menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat serta mendorong meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Meskipun penerapan transparansi manajemen telah berjalan dengan baik, penelitian menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sarana informasi, ukuran papan pengumuman yang terbatas, rendahnya minat masyarakat membaca laporan tertulis, keterbatasan tenaga dan waktu pegawai untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap istilah administratif dan keuangan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi tidak hanya bergantung pada keterbukaan informasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi secara efektif serta kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan media informasi, peningkatan literasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang lebih modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Liberia memaknai transparansi sebagai tanggung jawab moral, kewajiban hukum, bentuk keadilan, dan sarana membangun kepercayaan publik. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan kebijakan, program kerja, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Para aparatur berharap transparansi di masa

depan dapat semakin ditingkatkan melalui penggunaan media digital, pertemuan warga yang lebih intensif, pemanfaatan grup komunikasi masyarakat, penyederhanaan laporan keuangan, serta perluasan akses informasi hingga ke seluruh dusun. Dengan demikian, transparansi diharapkan menjadi budaya kerja yang melekat dalam pemerintahan desa dan mampu memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi manajemen di Desa Liberia telah berjalan dengan cukup baik dan menjadi bagian dari budaya kerja aparatur desa. Keterbukaan informasi dilaksanakan melalui papan pengumuman, rapat, musyawarah desa, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga pegawai dan warga dapat mengetahui berbagai kebijakan, program, serta penggunaan anggaran desa. Seluruh aparatur desa merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif, di mana setiap pegawai diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan aspirasi sebelum kebijakan ditetapkan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa juga dinilai baik karena laporan keuangan dan kegiatan dipublikasikan secara terbuka, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan tertulis.

Dari sisi kepemimpinan, pimpinan desa dinilai telah memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai berbagai kebijakan sehingga memudahkan pegawai memahami arah kerja dan melaksanakan tugasnya. Hubungan antarpegawai juga berlangsung harmonis, didukung komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik sehingga mendukung terciptanya keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai program desa relatif mudah diakses, baik melalui media informasi maupun sosialisasi langsung, walaupun sebagian warga masih kurang aktif membaca pengumuman tertulis. Secara umum, masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap keterbukaan informasi dengan meningkatnya kepercayaan, partisipasi, dan keberanian untuk menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah desa.

Namun demikian, implementasi transparansi masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sarana informasi, terbatasnya media komunikasi, rendahnya minat membaca masyarakat, serta keterbatasan waktu dan tenaga pegawai untuk melakukan sosialisasi. Aparatur desa memaknai transparansi sebagai tanggung jawab moral, kewajiban hukum, bentuk keadilan, dan sarana membangun kepercayaan publik dalam pelayanan masyarakat. Ke depan, mereka berharap transparansi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami, perluasan sosialisasi hingga ke tingkat dusun, serta integrasi keterbukaan informasi dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan desa dapat semakin meningkat.

REFERENSI

Dwiyanto, Agus. (2020). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

- Dwi Handayani. (2022). *Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Desa Karanganyar, Jawa Tengah*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Rahardjo, Budi. (2021). *Etika dan Tata Kelola Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rina Oktaviani. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
- Riska Ayu Pratiwi. (2021). Persepsi Perangkat Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Repository Universitas Negeri Malang (Skripsi)
- Ruky, Achmad S. (2020). *Manajemen Kinerja*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saptiana Nata Eka & Ismiyati. (2021). Persepsi Aparatur Desa terhadap Implementasi Good Governance di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Economic Education Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang
- Sedarmayanti. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Siagian, Sondang P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sutrisno, Edy. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana. Jakarta.
- Thoha, Miftah. (2020). *Perilaku Organisasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2021). *Reformasi Administrasi Publik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Umar, Husein. (2022). *Manajemen Strategis dalam Organisasi Publik*. Mitra Wacana Media. Jakarta.